

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Fariz Isyraqi Aryasandi¹, Fajar Syaiful Akbar²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
faizaryasandi46@gmail.com¹, fajarsa.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Utilizing data collected from 2018 to 2022, this research will analyze the influence of local original income, transfer income and economic growth of Regency/City Regional Governments in Central Java Province. The object of this research is the Regency/City Regional Government of Central Java Province. This research data was compiled using statistical information on Gross Regional Domestic Product (GRDP) and reports on the realization of the APBD budget of Regency/City Regional Governments in Central Java Province. This type of research is quantitative research. The sampling method used was purposive sampling with a total of 33 Regency/City local governments selected as samples. Secondary sources, such as papers released by the official DJPK website of the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency, were the data sources used in this research. Research data were analyzed using multiple linear regression. Regional original income, transfer income and economic growth are three factors that influence the performance of district and city government budgets in Central Java Province, according to the research. This study finds that although local revenue has a negative influence and transfer income has a positive influence on the financial performance of the regional government of Central Java Province, economic growth has the opposite impact.

Keywords: *Regional Original Income; Transfer Income; Economic Growth; Financial Performance*

ABSTRAK

Memanfaatkan data yang dikumpulkan dari tahun 2018 hingga 2022, penelitian ini akan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini disusun dengan menggunakan informasi statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laporan realisasi anggaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total 33 pemerintah daerah Kabupaten/Kota terpilih menjadi sampel. Sumber sekunder, seperti makalah yang dirilis oleh situs resmi DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pertumbuhan ekonomi merupakan tiga faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, menurut penelitian tersebut. Studi ini menemukan bahwa meskipun pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh negatif dan pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak sebaliknya.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; Pertumbuhan Ekonomi; Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Salah satu daerah Indonesia yang menjalankan otonomi daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. Dengan mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah federal ke negara bagian dan wilayah, atau “otonomi daerah,” kita dapat mendesentralisasikan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan ke tingkat di mana masyarakat lokal dapat melayani penduduknya dengan lebih baik. Sistem ini ditetapkan melalui UU 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU 32 Tahun 2004, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang (Putri & Darmayanti, 2019). Dengan kebebasan mengambil keputusan di tingkat daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset dan peluang unik yang dimiliki masing-masing daerah, atau mereka dapat mengembangkan daerahnya dan membimbing masyarakat menuju keberhasilan (Simamora & Budiwijaksono, 2022). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangannya. Untuk menjamin pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah harus berjalan lancar dan optimal (Sari & Mustanda, 2019).

APBD merupakan cerminan kompetensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya; dokumen ini merinci kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai inisiatif yang memajukan kesetaraan dan keadilan dengan memaksimalkan potensi daerah (Vurry et al., 2018). Karena merupakan sumber pendapatan utama daerah jika demikian, maka tercapainya otonomi daerah sebagian besar difasilitasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah segera mengumumkan dana tersebut, dengan mempertimbangkan semua peraturan dan ketentuan terkait. Bisa saja berasal dari sumber pendapatan daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Komponen pendapatan transfer yang utama dalam kerangka APBD selain itu adalah Dana Perimbangan. Tujuan dana perimbangan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No. 33 Tahun 2004, adalah untuk mempersempit ketimpangan anggaran antara pemerintah federal dan berbagai pemerintah daerah (Andriana, 2020). Salah satu ukuran perbaikan ekonomi secara keseluruhan adalah pertumbuhan ekonomi, yang masih banyak digunakan. Kegiatan yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi mungkin mempunyai dampak baik dan buruk. Salah satu cara untuk melihat hal ini adalah bahwa aktivitas perekonomian meningkat ketika perekonomian tumbuh, dan menurun ketika perekonomian melemah. (Febrianty & Putra, 2023).

Rasio pengukuran kinerja keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing daerah dalam mencapai dan melaksanakan otonomi daerah (Putri & Ratnawati, 2023). Pemanfaatan PAD yang optimal untuk penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan kinerja keuangan daerah yang kuat (Apridiyanti, 2019). Kinerja suatu

organisasi sektor publik dapat dievaluasi dengan menghitung rasio independensinya. Jika rasio kemandirian suatu daerah turun antara 75% dan 100%, 50% dan 75%, 25% dan 50%, atau 0% dan 25%, maka daerah tersebut dianggap mandiri (Mahmudi, 2019:140).

Dengan rata-rata sebesar 27,38% pada tahun 2022, rasio kemandirian kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tergolong rendah. Pada tahun 2022, terdapat disparitas tingkat ketergantungan yang sangat besar antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari tiga puluh lima pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, hanya satu yang dinilai berkualitas unggul, sementara satu lainnya dinilai berkualitas sedang. Kendati demikian, menurut statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, indeks integritas pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat lima besar secara nasional. Kecil kemungkinan korupsi terjadi pada organisasi atau pemerintah daerah yang memiliki tingkat integritas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya korupsi pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sangat minim.

Penulis akan membangun berdasarkan latar belakang yang diberikan dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stewardship

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori stewardship dimana teori ini merupakan bagian dari teori keagenan. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Agar dapat mencapai tujuannya, gagasan ini dapat berfungsi sebagai sistem akuntabilitas untuk menjamin pengawasan, audit, dan pelaporan yang efektif (Angelina et al., (2020).

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu jenis pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah. Sejauh diizinkan oleh hukum, pemerintah daerah secara langsung mengelola uang tersebut, yang bersumber dari kemungkinan sumber pendapatan daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Beberapa indicator dapat digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah, termasuk PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah tertentu, dan pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Transfer

Tujuan pemindahan uang dari APBN atau APBD ke daerah lain adalah untuk menyamakan kedudukan finansial dan menutup kesenjangan anggaran sehingga

setiap daerah lebih mudah membentuk sistem pemerintahannya sendiri. Dana Transfer mengacu pada rincian mekanisme, komponen, dan aturan yang mengatur pendistribusiannya. Dana yang diperuntukkan bagi Otonomi Khusus, Perimbangan, Insentif Daerah, Khusus, dan Desa merupakan beberapa contoh indikator pendapatan transfer.

Pertumbuhan Ekonomi

Ketika perekonomian suatu daerah tumbuh, berarti mampu menciptakan lebih banyak produk dan jasa. Salah satu definisi pertumbuhan ekonomi adalah perbaikan situasi ekonomi suatu negara secara bertahap namun stabil dari waktu ke waktu. (Yasin, 2020). Perkiraan produk domestik bruto regional (PDRB) mungkin bisa menjadi salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menetapkan nilai suatu entitas atau situasi dengan angka yang tetap menggunakan alat pengukuran. Pada sektor publik pengukuran ini berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja, mengalokasikan sumber daya, membuat keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Rasio efisiensi belanja adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan fiskal pemerintah daerah. Untuk mengetahui berapa banyak uang yang dihemat pemerintah, mereka melihat rasio efisiensi belanja. Angka relatif dan bukan angka absolut yang muncul dari rasio efisiensi inilah yang paling penting.

METODE PENELITIAN

Dengan “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)” sebagai variabel terikat, penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kuantitatif, sedangkan “Pendapatan Asli Daerah (X1), Pendapatan Transfer (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3)” sebagai variabel bebas. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah objek penelitian pada penelitian ini. Data PDRB Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Realisasi APBD diperlukan untuk menganalisis objek ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel yang disebut dengan *purposive sampling*. Sampel penelitian mencakup 33 pemerintah daerah dari tahun 2018 hingga 2022, menghasilkan 165 data. Sumber sekunder, seperti Laporan Realisasi Anggaran yang dirilis oleh situs resmi DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan serangkaian uji statistik seperti normalitas, asumsi klasik, regresi berganda, F, t, dan koefisien. Kami menggunakan SPSS versi 25 untuk mengolah data pengujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Memberikan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan adalah inti dari statistik deskriptif. Anda dapat mendeskripsikan data dengan melihat rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi masing-masing variabel.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	16 5	179,224	2,545,99 1	432,386	332,262
Pendapatan Transfer (X2)	16 5	607,888	2,589,69 7	1,700,22 1	4,826,817
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	16 5	-10.28	6.81	3,5518	3.0840
Kinerja Keuangan (Y)	16 5	.78	1.16	.9595	.06030

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

- Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki rata-rata (mean) sebesar 432,386 serta nilai standar deviasi sebesar 332,262. Sedangkan nilai maksimum sebesar 2,545,991 dengan nilai minimum sebesar 179,224". Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar deviasi dengan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan penyimpangan yang rendah dalam data, sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebar secara merata.
- Variabel Pendapatan Transfer (X2) memiliki rata-rata (mean) 1,700,221 serta nilai standar deviasi sebesar 4,826,817. Sedangkan nilai maksimum sebesar 2,589,697 dengan nilai minimum sebesar 607,888. menurut temuan ini jika Dibandingkan dengan standar deviasi, rata-rata pendapatan transfer lebih kecil, menunjukkan penyimpangan yang tinggi dalam data, sehingga variabel Pendapatan Transfer bersifat heterogen.
- Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) memiliki 3,0840 standar deviasi dari mean 3,5518. Pada saat yang sama, kisarannya adalah dari -10,28 hingga 6,81. Berdasarkan temuan tersebut, variabel Pertumbuhan Ekonomi terlihat berdistribusi normal dengan mean yang melebihi standar deviasi.
- Variabel Kinerja Keuangan (Y) memiliki rata-rata 0,9595 dan standar deviasi 0,06030. Sedangkan angka terendah sebesar 0,78 dan terbesar sebesar 1,16. Berdasarkan temuan ini, rata-rata Kinerja Keuangan melebihi standar deviasi

2. Uji Normalitas

Dalam model regresi, uji normalitas menentukan apakah variabel independen dan dependen berdistribusi normal. “Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) akan digunakan untuk menentukan apakah data penelitian kami mengikuti distribusi normal. Tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya menurut Ghozali (2018), data tidak terdistribusi secara teratur jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05”.

Tabel 2. Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	165
Exact Sig. (2-tailed)	.198

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel 2 menampilkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang menegaskan bahwa metode regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, dengan tingkat signifikansi data sebesar 0,198 > 0,05.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan uji multikolinieritas, kita dapat mengetahui apakah model regresi yang diusulkan berhasil mengidentifikasi keterkaitan antar variabel independen. Dengan memeriksa nilai VIF dan Toleransi, kita dapat menentukan apakah terdapat multikolinieritas. Baik batas nilai VIF maupun toleransinya ditetapkan sebesar 10. Menurut Ghozali (2018), multikolinieritas tidak terjadi bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Coefficients		
Model	<i>Colinierity Tolerance</i>	<i>Statistics VIF</i>
PAD	.841	1.189
Pendapatan Transfer	.841	1.189
Pertumbuhan Ekonomi	.998	1.002

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti multikolinieritas pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pertumbuhan Ekonomi, karena nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIFnya kurang dari 10.

b. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara confounding error pada periode t dengan periode t-1 (periode sebelumnya), digunakan uji autokorelasi pada model regresi linier berganda. Masalah autokorelasi muncul ketika ada korelasi. Korelasi antara pengukuran yang berurutan dari waktu ke waktu inilah yang menyebabkan autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary	
Model	Durbin-Watson
1	1.927

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Dengan 3 (k) variabel bebas, maka jumlah sampel sebanyak 165 (N). Berikut hasil 1,7085 untuk dL dan 1,7825 untuk dU. Akibatnya, menjadi 2,2175 untuk 4-dU. Karena $1,7825 < 1,927 < 2,2175$ maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Memeriksa adanya heteroskedastisitas pada model regresi berarti mencari bukti adanya variansi yang tidak merata pada residu pengamatan yang berbeda. Untuk mengetahui hubungan nilai residu dengan variabel independen lainnya, penelitian ini menggunakan uji Park. “Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 dianggap signifikan”. Nilai probabilitas di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data tersebut mengalami heteroskedastisitas (Ghozali (2018): 142).

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.000
PAD	.112
Pendapatan Transfer	.349
Pertumbuhan Ekonomi	.109

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Dari hasil pengujian data pada tabel 5, menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat signifikansi > 0,05 yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi 0,112, Pendapatan Transfer memiliki signifikansi 0,349 dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki signifikansi 0,109 yang berarti penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel yaitu “Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pertumbuhan Ekonomi

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah”.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	.924
PAD	-4,783
Pendapatan Transfer	1,143
Pertumbuhan Ekonomi	0,010

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berikut adalah temuan dari analisis regresi linier berganda, yang jika digabungkan akan menghasilkan persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,924 - 4,783X_1 + 1,143X_2 + 0,010X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka masing-masing koefisien dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,924 menyatakan bahwa ketika semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu “Pendapatan Asli Daerah” (X1) dan “Pertumbuhan Ekonomi” (X2) diasumsikan sama dengan 0, maka “Kinerja Keuangan” (Y) memiliki nilai sebesar 0,924.
2. Nilai koefisien variabel “Pendapatan Asli Daerah” (X1) bernilai -4,783. “Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap sama, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan satu unit akan menyebabkan penurunan Kinerja Keuangan sebesar -4,783”.
3. Nilai koefisien variabel “Pendapatan Transfer” (X2) bernilai 1,143. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap sama, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan satu unit akan menyebabkan peningkatan “Kinerja Keuangan” sebesar 1.143 unit.
4. Nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) bernilai 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa, jika semua hal lainnya sama, kenaikan satu unit akan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,010 unit.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menguji seberapa baik model regresi linier berganda dalam menangkap hubungan antara variabel terikat dan bebas adalah inti dari Uji Kesesuaian Model (Uji F).

Tabel 7. Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA		
Model	F	Sig.
Regression	26,363	.000

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Data di atas menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Oleh karena itu, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi linier berganda sesuai untuk penelitian ini.

b. Uji Parsial (t)

Dengan menggunakan uji parsial, yang sering disebut uji t, kita dapat menguji koefisien regresi secara terpisah untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Uji Parsial (t)

Coefficients		
Model	t	Sig.
(Constant)	64.200	.000
PAD	-3.744	.000
Pendapatan Transfer	1.300	.195
Pertumbuhan Ekonomi	8.183	.000

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

1. Nilai 0,000 pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 yang menunjukkan kurang signifikan secara statistik. Nilai Ttabel sebesar 1,97481 dengan tingkat signifikansi 0,025 dan derajat kebebasan 161, sedangkan nilai Thitung -3,817. $Thitung < Ttabel$ ($-3.817 < -1.97481$) terlihat dari temuan tersebut. Terdapat korelasi negatif yang jelas dan substansial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan.
2. Variabel Pendapatan Transfer signifikan secara statistik dengan nilai 0,195, di atas standar signifikansi 0,05. Nilai Ttabel sebesar 1,97481 dengan $df = 161$ dan signifikansi 0,0025; Jumlahnya 1.300. Hasil penelitian menunjukkan Thitung lebih kecil dari Ttabel ($1,300 < 1,97481$). Oleh karena itu, Kinerja Keuangan tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Transfer.
3. Nilai sebesar 0,000 untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi kurang dari batas signifikansi sebesar 0,05. Dengan derajat kebebasan 161 dan tingkat signifikansi 0,025 diperoleh Thitung sebesar 1,97481, sedangkan Thitung sebesar 8,183. Data ini menunjukkan Thitung lebih besar dari Ttabel ($8,183 > 1,97481$). Kinerja keuangan secara substansial dan signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melakukan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary		
Model	R	R Square
1	.574	.329

Sumber : Data Diolah Peneliti(2024)

Tabel tersebut menunjukkan diperoleh nilai R-Square sebesar 0,329 atau 32,9%. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan variabel pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 32,9 persen, sedangkan variabel atau model lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini menjelaskan sisanya sebesar 67,1 persen.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa “pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis tersebut valid. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah”. Pemerintah daerah bertanggung jawab langsung dalam mengelola pendapatan tersebut, yang bersumber dari kemungkinan sumber pendapatan daerah. Dalam studi ini, rasio efisiensi belanja digunakan sebagai metrik untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah kota mengevaluasi efisiensi belanjanya adalah dengan melihat rasio efisiensi belanja.

Tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat dan kemampuannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dijelaskan dalam Stewardship Theory. Kecenderungan berlebihan untuk memboroskan dana pada proyek-proyek besar atau belanja rutin dapat disebabkan oleh tingginya pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan secara keseluruhan mungkin terganggu akibat pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, rasio efisiensi belanja akan turun yang merupakan indikasi buruknya kinerja keuangan, jika Pendapatan Asli Daerah tinggi namun anggaran belanja tidak digunakan secara efektif. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya oleh Angraini & Hidayat (2023) Hal ini bertolak belakang dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa “pendapatan asli daerah berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”. Rohyana & Rozak (2022) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer tidak mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah, menurut premis studi ini. Oleh karena itu, hipotesis nol tidak dapat diterima. Tujuan pemindahan uang dari APBN atau APBD ke daerah lain adalah untuk menyamakan kedudukan finansial dan menutup kesenjangan anggaran sehingga setiap daerah lebih mudah membentuk sistem pemerintahannya sendiri. Dalam studi ini, rasio efisiensi belanja digunakan sebagai metrik untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah kota mengevaluasi efisiensi belanjanya adalah dengan melihat rasio efisiensi belanja.

Untuk membantu pemerintah daerah memberikan kepuasan masyarakat, pendapatan transfer diberikan berdasarkan *Stewardship Theory*. Semakin besar jumlah uang yang dialokasikan, maka dampaknya akan semakin baik. Meski demikian, dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak bisa hanya dilihat dari besarnya alokasi dana transfer. Alokasi dana transfer daerah yang tidak efisien atau tidak diprioritaskan memang terjadi dari waktu ke waktu. Penyalahgunaan atau penggunaan uang transfer yang tidak efisien untuk meningkatkan kinerja keuangan dapat terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat. Penggunaan uang transfer yang tidak efektif dan boros mungkin disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan kemampuan administratif di beberapa daerah. Karena tujuan dana tersebut adalah untuk meningkatkan fasilitas dan layanan publik, maka penyalahgunaannya akan semakin menurunkan rasio efisiensi belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bisa saja gagal meningkatkan kinerja keuangannya dengan mengelola pendapatan transfer dengan baik.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan Sofyan dan Akbar (2024) yang menemukan bahwa pendapatan transfer berdampak negatif terhadap kinerja, dan sejalan dengan penelitian Tanjung (2019) yang menemukan bahwa pendapatan transfer tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendanaan untuk Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan temuan pengujian hipotesis penelitian ini. Oleh karena itu, teori tersebut memang benar. Ketika perekonomian suatu daerah tumbuh, berarti mampu menciptakan lebih banyak produk dan jasa. Perkembangan suatu daerah dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Dalam studi ini, rasio efisiensi belanja digunakan sebagai metrik untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah kota mengevaluasi efisiensi belanjanya adalah dengan melihat rasio efisiensi belanja.

Berdasarkan Teori *Stewardship*, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat mendukung pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini mengurangi beban pemerintah daerah dalam menyediakan jaminan sosial dan program bantuan sosial, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih efektif dan efisien untuk pembangunan layanan publik lainnya. Rasio efisiensi pembelanjaan merupakan indikator yang sangat baik mengenai dampak perbaikan kinerja keuangan, dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian daerah. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Panggabean (2019) Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah dan tidak terlepas dari hasil penelitian yang diperoleh Nadia & Putra (2023), tidak menemukan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2022, Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2022 dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat melakukan perencanaan dan mengelola anggaran belanja dengan baik agar memastikan bahwa anggaran belanja yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran rasio kinerja keuangan yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengeneralisasi hasil penelitian dan Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, karena pemerintah daerah telah memberikan keterbukaan informasi sesuai undang- undang yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah agar kinerja keuangan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). 2757-Article Text-10472-3-10-20210518. 4(1).
- Angraini, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 141–163. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/737>

Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>

Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>

Dyah Ratnawati, S. P. P. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. Badan ...*, 6(2), 2068–2082.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang : Universitas Diponegoro.

Mahmudi. (2016). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta.

Nadia Febrianty, & Gerry Hamdani Putra. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 30–46. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154>

Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 1–19. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/122>

Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>

Rohyana, C., & Abdul Rozak, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kineja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Land Journal*, 3(2), 60–71. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i2.2308>

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>

Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>

Sofyan, A., & Syaiful Akbar, F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pembiayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1276–1287. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.862>

Tanjung, R. I. A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman*. 1–9.

Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.
<https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>